

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dan urgensi pemerintah menetapkan kembali pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: 1) bagaimanakah ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden? dan 2) apakah urgensi pemerintah menetapkan kembali pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden? Metode penelitian skripsi ini ditulis dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang meliputi penelaahan konflik hukum, kekosongan hukum, atau kekaburan norma, dengan menggunakan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*). Hasil penelitian diketahui bahwa 1) Ketentuan hukum yang mengatur pasal penghinaan secara umum terdapat dalam Pasal 310-321 KUHP dan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal penghinaan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya diatur dalam Pasal 134 KUHP, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP. Pada saat ini, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari Pasal 218 Ayat (1) dan (2), Pasal 219, dan Pasal 220 Ayat (1) dan (2), pasal penghinaan secara umum diatur pada Pasal 433 Ayat (1), (2) dan (3). 2) Urgensi hukum pemerintah tentang perlu dipertahankannya pasal penghinaan yaitu Presiden merupakan simbol negara, penghapusan pasal penghinaan akan menjadikan budaya demokrasi yang liberal, kepentingan yang hendak dilindungi yaitu martabat atau derajat kemanusiaan, delik yang digunakan pada pasal ini yaitu delik aduan, kedudukan Presiden berbeda dengan masyarakat pada umumnya, sehingga tidak pantas untuk menghadapkan atau mempertanyakan hal ini dengan asas persamaan dihadapan hukum.

Kata kunci : penghinaan, presiden, wakil presiden.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze the legal provisions governing the crime of insulting the President and Vice President and the government's urgency to re-establish the article on insulting the President and Vice President. The formulation of the problem in this study is: 1) what are the legal provisions governing the crime of insulting the president and vice president? and 2) what is the urgency for the government to re-establish the article on insulting the President and Vice President? The research method of this thesis is written using a normative juridical research type, which includes studying legal conflicts, legal vacuums, or ambiguity in norms, using various approaches, including the conceptual approach, the statutory approach, the case approach. case law approach). The results of the research show that 1) The legal provisions governing the defamation article in general are found in Articles 310-321 of the Criminal Code and Article 27 Paragraph (3) of the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE). Articles of contempt or the dignity of the President and Vice President were previously regulated in Article 134 of the Criminal Code, Article 136 bis and Article 137 of the Criminal Code. Currently, it is regulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code which consists of Article 218 Paragraphs (1) and (2), Article 219, and Article 220 Paragraphs (1) and (2) as well as the general defamation article regulated in Article 433 Paragraph (1), (2) and (3). 2) The government's legal urgency regarding the need to defend the insult article, namely the President is a symbol of the state, the abolition of the insult article will create a liberal democratic culture, the interests to be protected are human dignity or degrees, the offense used in this article is the complaint offense, the position of the President is different from society in general, so it is inappropriate to confront or question this on the principle of equality before the law.

Keyword : *contempt, president, vice president.*